

BAB III

HUTAN MANGROVE NAGARI MALIGI

3.1 Gambaran Umum Nagari Maligi

3.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Nagari Maligi

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang lahir pada tanggal 7 Januari 2004. Keputusan ini berdasarkan UU No. 38 tahun 2003. Pasaman Barat memiliki luas wilayah yang cukup besar yakni 3.887, 77 km, dengan bentuk permukaan tanah yang bergelombang. Jarak Kabupaten dari kota Padang adalah 180 km. Pasaman Barat memiliki pantai sepanjang 152 km dan deretan pegunungan bukit barisan, dua gunung terbesar adalah Gunung Talamau dan Gunung Pasaman. Pasaman Barat terletak pada 00°33' LU - 00°11' LS dan 99°10' BT – 100° 04' BT. Batas wilayah bagian utara adalah Kabupaten Mandailing Natal, bagian selatan adalah Kabupaten Agam, bagian barat adalah Samudera Hindia dan bagian timur adalah Kabupaten Pasaman.

Tabel 3.1
Topografi Kabupaten Pasaman Barat

NO	Kecamatan	Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
1	Sungai Beremas	0-319
2	Ranah Batahan	23-753
3	Koto Balingka	0-811
4	Sungai Aur	0-1875
5	Lembah Melintang	15-725
6	Gunung Tuleh	26-1875
7	Talamau	225-2010
8	Pasaman	40-2913
9	Luhak Nan Duo	0-1250
10	Sasak Ranah Pasisie	0-10
11	Kinali	0-1332

Sumber : Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Pasaman Barat 2024.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang dilalui garis khatulistiwa yang terletak antara 0°03' Lintang Utara-0°11' Lintang Selatan dan antara 99°10'-100°04' Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 atau 9,29% dari luas wilayah provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat memiliki wilayah administrasi dengan perbatasan sebagai berikut :

1. Utara : Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
2. Timur : Kabupaten Pasaman
3. Selatan: Kabupaten Agam
4. Barat : Samudera Hindia

Sumber daya alam di kawasan pegunungan dan perbukitan di bagian Timur Kabupaten Pasaman Barat, serta daerah dataran rendah dengan daerah pertanian serta kawasan pantai dan laut dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 152 km, merupakan aset dan kekuatan untuk mendorong perekonomian daerah. Ini menyimpan potensi yang sangat menjanjikan, termasuk di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan serta pariwisata dan potensi lainnya.

Berbicara tentang keindahan alam di Sumatera Barat, yang terbayang mungkin adalah gunung-gunung yang megah dengan puncak-puncak yang menggapai langit, serta hamparan sawah yang hijau, membentang luas seperti permadani alam yang tak berujung. Salah satu desa terpencil yang memiliki pantai memukau dan menawarkan keindahan yang tak terlupakan adalah nagari maligi. Terletak di tepi pantai Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari maligi meskipun termasuk desa yang jarang dikunjungi maligi memiliki pesona alam yang menyaingi destinasi wisata pantai terkenal di Indonesia. (Ananta, 2024, 182)

Pantai di Nagari Maligi adalah surga yang belum banyak diketahui, menampilkan pemandangan yang menakjubkan. Pasir putih yang halus dan air laut yang jernih layaknya kristal terbentang luas di sepanjang tepi pantai, menciptakan pemandangan yang seakan tak berujung. Di kejauhan, terlihat

hamparan hutan bakau yang hijau dan subur, menambah daya tarik dan keindahan alam pantai Maligi. Maligi merupakan salah satu desa wisata yang terletak di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Maligi ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2019 melalui SK Bupati Pasaman Barat. Meskipun perjalanan menuju desa ini masih memerlukan usaha ekstra karena medan yang cukup menantang, dengan jalan utama yang tidak beraspal dan harus melewati perkebunan sawit.

Penduduk di Nagari Maligi memiliki mata pencaharian utama pada sektor pertanian (kebun) dan perikanan. Sumber utama di daerah ini cukup memadai untuk mendukung pembangunan daerah serta menyediakan tenaga kerja. Sejarah daerah ini relatif terasing menyebabkan banyak anak-anaknya menjadi perantau, baik di kota-kota Sumatera Barat maupun pulau Jawa. Secara umum, pemanfaatan lahan di Nagari Maligi didominasi oleh kebun yang mencapai luas 4.875 ha, mewakili lebih dari sepertiga dari total wilayah nagari maligi. Berbagai jenis tumbuhan perkebunan yang telah ditanam di nagari maligi mencakup kelapa sawit, kelapa, dan nilam.

Potensi sektor perikanan dan kelautan di nagari persiapan maligi (baik perairan laut maupun perairan umum) memiliki kemampuan yang signifikan untuk mendukung perekonomian serta upaya konservasi dan bisa menjadi bagian penting dalam pembangunan di masa mendatang. Nagari maligi adalah lokasi yang memiliki peluang besar untuk berfungsi sebagai pusat produksi ikan. Dengan panjang pantai sekitar 13 km, potensi perikanan dan kelautan di daerah ini masih belum dikelola secara optimal.

Selain potensi perikanan, Nagari Maligi memiliki beberapa pantai yang bisa dikembangkan menjadi tempat wisata. Sektor pariwisata di maligi sangat menjanjikan, yaitu terbukti dengan terpilihnya lokasi tersebut sebagai tempat syuting acara Si Bolang yang ditayangkan di Trans7. Keindahan alam maligi yang masih alami tentunya akan menambah daya tarik maligi, terutama jika dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat maligi.

Gambar : 3.1
Gambaran Umum Nagari Maligi



Sumber: <https://images.app.goo.gl/CkEbEeRBsJBXNTBf6>

Nagari Maligi terletak di pinggir pantai dengan garis pantai sekitar 15 km dan terdiri dari 5 jorong, di mana masyarakat di kawasan ini masih sangat aktif dalam berbagai kegiatan. Makanan khas yang mejadi andalan di desa maligi adalah rendang tiram dan lokan, yang diperoleh dari sungai batang maligi. Salah satu acara tahunan yang selalu diadakan adalah tagak tampuruang yang berlangsung pada malam 27 bulan Ramadhan sebagai wujud semangat masyarakat menyambut malam Lailatul Qodar. Selain itu, seni pertunjukan yang ada di desa Maligi meliputi Ronggeng dan gandang lasuang yang sering ditampilkan ketika ada tamu resmi yang berkunjung, seperti pernah ditampilkan pada syuting Si Bolang Trans7 pada tahun 2017 dan kedatangan tim GIPI Awards tahun 2020.

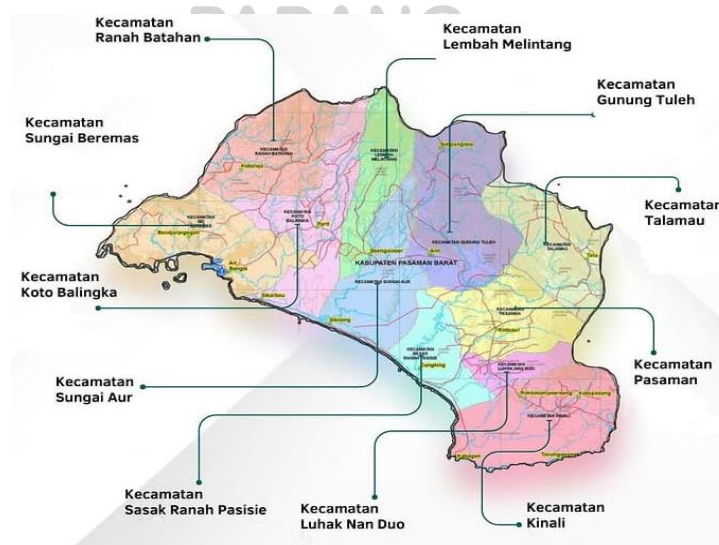
Keindahan alam Nagari Maligi tidak hanya terbatas di pantainya. Sikap masyarakat setempat yang ramah dan hangat menjadi daya tarik unik bagi para pengunjung. Warga nagari maligi dengan senang hati berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari mereka, Kebudayaan, dan Kearifan lokal yang mereka jaga dengan baik. Nagari maligi adalah desa terpencil dengan akses yang cukup menantang. Jalan utama menuju ke sana tidak beraspal dan

berbatu, serta harus melewati perkebunan sawit yang luas, membuat perjalanan menjadi cukup melelahkan. (Ananta, 2024, 182)

Dengan pesona alam pantai yang luar biasa, keramahan penduduknya, dan banyaknya kegiatan menarik yang bisa dilakukan, nagari maligi di Sumatera Barat benar-benar layak untuk dikunjungi dan dinikmati. Nikmati pengalaman yang tak terlupakan di tepi pantai yang tenang dan mempersona, dimana alam dan budaya bersatu dengan indah menciptakan kenangan yang akan selalu dikenang.

Gambar: 3.2

Letak geografis Nagari Maligi



Sumber: Profil Kabupaten Pasaman Barat 2023.

Nagari Maligi merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Maligi terletak pada bagian Barat Kabupaten Pasaman Barat membentang dari arah barat ketimur pada 0° 15' LU sampai 0° 05' LS dan 99 35' BT sampai dengan 99 40' BT, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Pangkal (Lingkung Aur)
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera India
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taban (Tompek Buruak)
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jorong Pasa Lamo Nagari Persiapan Ranah Pasisie.

Luas kawasan Kenagarian Maligi adalah 21.925 ha, yang terdiri dari 18.000 ha tanah daratan, 3.000 tanah rawa gambut, serta memiliki pantai yang membentang sepanjang 13 km dari Kabupaten. Di sekeliling Pantai Maligi dominan ditumbuhi oleh pohon kelapa, pohon aru, dan hutan bakau. Pada 3 Agustus 2024, Maligi meresmikan kejurongan Ujung Padang, sebagai satu wilayah administrasi jorong baru di bawah nagari. Nagari Maligi terbagi kedalam 5 (lima) jorong dengan rincian:

Tabel 3.2
Luas Wilayah Nagari Maligi

NO	Jorong	Luas Wilayah
1.	Pantai Indah	7.975 ha
2.	Suka Damai	2.990 ha
3.	Suka Jadi	3.185 ha
4.	Padang Jaya	3.000 ha.
5	Ujuang Padang	3.850 ha

Sumber: Pemerintahan Nagari Maligi 2025

Topografi kawasan maligi meliputi daerah datar dan bergelombang. Daerah ini terdiri dari lahan rawa, daerah pasir pantai terdapat pada sebagian

besar wilayah berbatasan dengan Tanjung Pangkal (lingkung aur). Topografi wilayah ini menjangkau hingga garis pantai, sedangkan bagian utaranya berbatasan dengan Samudera India. Maligi berada pada ketinggian antara 0 sampai 50 meter di atas permukaan laut. Tiga sungai mengitari maligi, yaitu Batang Pasaman di selatan, Batang Sikilang di utara, dan Batang Maligi di barat. Berdasarkan hal ini, Nagari maligi terbentuk dari delta ketiga sungai tersebut, yang terdiri dari endapan lumpur dan kawasan hutan.

Berdasarkan hasil wawancara di kantor wali nagari maligi bersama salah satu perangkat nagari, nagari maligi memiliki total penduduk yaitu sebanyak 4.408 jiwa dengan jumlah KK yaitu 1.500 KK yang terbagi dalam 5 jorong .

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk menurut KK

NO	Jorong	Jumlah Kartu Keluarga
1.	Pantai Indah	431
2.	Suka Jadi	350
3.	Suka Damai	200
4.	Padang Jaya	269
5	Ujuang Padang	250

Sumber: Pemerintahan Nagari Maligi 2025

Untuk fasilitas umum dan prasarana yang dimiliki Nagari Maligi cukup lengkap, seperti puskesmas, polindes/posyandu, pustu dan pos KB. Dalam bidang pendidikan berkembangnya pola pikir masyarakat bergantung pada pendidikan, sebab pendidikan adalah hal yang sangat berguna bagi kehidupan pola pikir masyarakat guna meraih kemajuan pembangunan. Pendidikan memiliki peran yang krusial dalam kehidupan manusia, di mana pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat untuk mewujudkan individu-individu pembangunan yang berkualitas mampu menciptakan peluang kerja dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan masyarakat.

Salah satu penyebab utama pentingnya pendidikan bagi anak adalah adanya dorongan dan semangat dari orang tua agar anak setidaknya menyelesaikan pendidikan di tingkat SLTA atau setara. Namun, saat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, orang tua sering kali terkendala masalah finansial dan tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi karena keadaan ekonomi.

Adapun data- data yang sudah penulis dapatkan dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Kenagarian Maligi dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Sarana Pendidikan

NO	Sarana	Jumlah
1	TK/PAUD	4
2	SD	2
3	SMP	1
4	TSANAWIYAH	1
5	SMA	1

Sumber : Pemerintahan Nagari Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat (2025).

Berdasarkan peta di atas di Kenagarian Maligi, pendidikan serta pengembangannya sudah hampir berjalan dengan baik, meskipun sarana pendidikan masih terbatas. Nagari Maligi berada dalam wilayah terpencil kabupaten Pasaman Barat. Terdapat tantangan aksesibilitas, termasuk risiko isolasi ketika terjadi banjir atau abrasi yang menutup jalan masuk ke nagari. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi jalan dan transportasi masih perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam menunjang peran kantor sebagai pusat pelayanan.

Kehadiran ajaran spiritual memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain berfungsi sebagai pendorong semangat hidup, ajaran ini juga berperan sebagai alat untuk pengendalian diri. Dengan adanya ajaran spiritual, interaksi antar individu menjadi lebih harmonis dan

seimbang. Agama juga sebagai dasar tata nilai dan merupakan penentu dalam perkembangan dan pembinaan rasa kemanusiaan.

Penduduk Pasaman Barat yang tersebar pada 11 kecamatan mayoritas menganut agama Islam, lebih kurang sekitar 97.54%. Sisanya yang terdiri dari 2,45% beragama non Islam yang terdiri dari 1,71% Katolik. 0,74% Protestan dan 0,01% lagi merupakan penganut agama Budha. Meskipun berbeda keyakinan, masyarakat Pasaman Barat dapat hidup berdampingan dalam kerukunan. Suasana harmonis tersebut dapat dilihat di sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintahan ataupun dalam lingkungan masyarakat. Diantara ratusan mesjid dan musholla yang berdiri di Pasaman Barat, juga terlihat gereja, sekolah-sekolah kristen yang terdapat pelajar islam didalamnya.

Masyarakat nagari maligi sebagian besar memeluk agama Islam. Agama acuan yang sangat hidup, manusia akan merasa tenang, damai, tabah, dan percaya diri, serta berani berjuang membela kebenaran, siap untuk mengabdikan dan berkorban. Tanpa agama, manusia akan merasa hilang arah dalam menjalani kehidupan. Agama juga merupakan sumber kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pasaman Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal di Sumatera Utara. Jaraknya yang dekat memudahkan penduduk Sumatera Utara merantau ke wilayah Pasaman Barat. Penduduk lainnya merupakan etnis jawa yang sengaja didatangkan ke Pasaman Barat untuk melaksanakan program transmigrasi dari Pemerintah Republik Indonesia.

Kehadiran agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, disamping sebagai motivasi hidup, agama juga berfungsi sebagai alat pengendalian diri. Dengan adanya agama, maka hubungan manusia dengan sesama makhluk menjadi selaras dan seimbang. Kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari etnis yang berbeda saling berinteraksi sehingga terjadilah akulturasi budaya. Salah satu bentuk akulturasi budaya tersebut dapat dilihat dari adat perkawinan. Perkawinan antara dua suku dalam

pelaksanaannya sering menggunakan bahkan memadukan tradisi dari masing-masing etnis, sehingga muncullah kebudayaan baru.

3.1.3 Struktur Perangkat Nagari Maligi

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan nagari dan badan permusyawaratan nagari berdasarkan asal usul nagari diwilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 3.5
Struktur Organisasi Nagari Maligi

NO	Nama	Jabatan
1	Irza Sofia S.E	P.J Wali Nagari
2	M. Gavis Alsyahiddin S.IP	Sekretaris Nagari
3	Edi Candra A.Md	Kaur Keuangan
4	Ida Eriza	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Ferdi Nadia Putra	Kasi Pemerintahan
6	Yuhendra S.Pd.I	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
7	Andusri	Kepala Jorong Suka Damai
8	Zulrahman	Kepala Jorong Pantai Indah
9	Narwanto	Kepala Jorong Suka Jadi
10	Ferdi Nadia Putra	Kepala Jorong Padang Jaya
11	Edi Candra A.Md	Kepala Jorong Ujuang Padang

Sumber : Pemerintahan Nagari Maligi (2025).

3.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

3.2.1 Sejarah Institusi Dinas Lingkungan Hidup

Institusi adalah suatu struktur organisasi yang telah tertanam dalam masyarakat, baik formal maupun informal, yang memiliki peran penting dalam mengatur perilaku dan interaksi sosial. Institusi ini bisa berupa aturan, norma, nilai maupun bangunan fisik yang menjadi tempat berlangsungnya aktivitas sosial. Institusi memiliki peran penting dalam mengatur interaksi sosial, ekonomi, politik, serta menciptakan norma dan aturan yang membimbing perilaku individu maupun kelompok.

Dalam konteks pemerintahan, institusi mencakup lembaga-lembaga seperti kementerian, dinas, dan badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Dalam masyarakat, institusi dapat berupa keluarga, sekolah, dan komunitas yang berfungsi untuk membentuk nilai-nilai dan norma sosial. Keberadaan institusi yang kuat dan efektif sangat penting untuk menciptakan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat, serta untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, institusi tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Dinas Lingkungan Hidup adalah Instansi teknis daerah yang menjadi salah satu bagian pendukung tugas Bupati dalam menyusun dan menjalankan kebijakan daerah yang khusus. Dinas lingkungan hidup juga berperan sebagai pelaksana otonomi daerah dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah dengan mengacu pada prinsip otonomi dan tugas. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup kota Tangerang Selatan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Pasaman Barat yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup juga berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengedukasi dan memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan mangrove.

Dinas ini mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti program penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam. Dengan demikian, keberadaan Dinas Lingkungan hidup sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan serta dengan peran dan tanggung jawab yang luas, Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi secara signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerahnya.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas perencanaan, evaluasi kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, dan kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, dinas lingkungan hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen RPPLH, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD serta sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/ kepulauan dan ekoregion;
3. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis daerah;

4. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);
5. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan;
6. perlindungan Penyusunan dan pengelolaan lingkungan hidup; kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (HMA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
7. Menyelenggarakan inventarisasi dan pengelolaan data dan informasi di bidang lingkungan hidup skala kabupaten;
8. Menyelenggarakan pengembangan sistem jaringan data dan informasi lingkungan dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyediaan informasi lingkungan;
9. Melaksanakan pengumpulan data basis dan penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten.
10. Melaksanakan pengumpulan data basis dan penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kabupaten;
11. menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati skala kabupaten;
12. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
13. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
14. Penilaian terhadap dokumen lingkungan {AMDAL dan UKL/UPL};
15. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
16. Pembuatan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL/) rekomendasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan;

17. Mengkaji dan menyiapkan serta penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi dan pembuangan air limbah ke air/ sumber air;
18. Mengkaji dan menyiapkan pemberian rekomendasi izin gangguan dan menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
19. Memfasilitasi penerimaan pengaduan, penelaahan, dan verifikasi atas usaha;
20. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas basil tindak lanjut pengaduan;
21. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan dan sosialisasi tata cara pengaduan;
22. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
23. Penentuan baku mutu lingkungan serta melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
24. Perencanaan, pemantauan, pengawasan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati serta pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
25. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota dan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
26. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota
27. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
28. Penyediaan sarpras penanganan sampah
29. Melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan di sekitar kota di kabupaten Pasaman Barat;

30. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
31. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
32. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan pertamanan
33. Mengkoordinasikan Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan dibidang kebersihan
34. Menyusun kebijakan mengenai penerangan lampu taman dan jalan raya Melaksanakan pengadaan lampu dan Melakukan pemeliharaan terhadap lampu taman dan jalan raya
35. Penyiapan perumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA;
36. Pengembangan sistem informasi dan database pengelolaan TAHURA
37. Penyiapan perumusan kebijakan terkait pengembangan kerjasama dan kemitraan pengelolaan TAHURA;
38. Penyiapan perumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA dan rumusan kebijakan terkait rencana penerimaan PNPB dalam pemanfaatan Sumber Daya Hutan di kawasan TAHURA;
39. Penyiapan perumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam, pengawetan Sumber Daya Hutan (SDH), pengamanan dan perlindungan Sumber Daya Hutan dan Ekosistem (SDHE) serta rehabilitasi kawasan TAHURA yang mengalami kerusakan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam di kawasan TAHURA;
40. Penyiapan perumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam, pengawetan

Sumber Daya Hutan (SDH), pengamanan dan perlindungan Sumber Daya Hutan dan Ekosistem (SDHE) serta rehabilitasi kawasan TAHURA yang mengalami kerusakan. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA

41. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA; dan Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.2 Struktur Kepengurusan Institusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan dan pertamanan di wilayah kabupaten pasaman barat. Sejak pemekaran kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2004, Dinas Lingkungan Hidup sudah dibentuk dan memulai eksistensinya di Kabupaten Pasaman Barat. Hingga pada tahun 2016 dinas lingkungan hidup mengalami perombakan besar, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dinas Lingkungan Hidup ditugaskan sebagai dinas yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam menangani masalah lingkungan hidup di Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun yang sama, untuk memperkuat kinerja Dinas Lingkungan Hidup, bupati pasaman mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 mengenai posisi, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta cara kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian, saat ini masyarakat lebih mengenal dinas lingkungan hidup kabupaten Pasaman Barat. Dinas ini memiliki tugas utama membantu Bupati dalam mengelola pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, perumusan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Tabel 3.6
Struktur Kepengurusan Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasaman Barat

No	Nama	Jabatan
1	H. Edison Zelmi. S.STP.MM	Kepala Dinas
2	Afkar S.IP	Sekretaris Dinas
3	Neldia Vendra Sp	Kepala B. Penataan PPLH
4	Sudirman, Skm	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan Dan Kawasan Konservasi
5	Andika Saputra, SE.,MM	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kegiatan
6	Zulmaiusti SH	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda
7	Upik	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8	Elfehmi Suryati, Skm	Analisis Aplikasi Pengelola Data Kepegawaian
9	Sasti Nofera SE	Analisis Aplikasi Pengelola Data dan Sistem Keuangan
10	Gusrida, Skm	Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Muda
11	Deddi Ramon, A.Md.K3	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda
12	Ratna Dia Komala Nitri,S.Pd	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
13	Yulita Nurman, S.Si	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda

14	Ahmad Abdi, Skm	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
15	Putri Rismawanti, SE.,M.I.Kom	Fungsional Analis Perencana Ahli Muda
16	Ziad Abdul Rozaq,ST	Kepala B. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
17	Laila Syofina,A.Md.Keb	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
18	Romi,SH	Analisis Pengaman Lingkungan
19	Dewi Putri Rahmadani, Sst	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
20	Fachrur Rijal, S.Si.,M.Si	Penelaah Dampak Lingkungan
21	Mirawati, Am.Ak	Pengelola Kepegawaian
22	Danil Pratega, A.Md	Pengelola Kepegawaian
23	Muhammad Saleh, A.Md	Pengelola Sarana Prasarana Bengkel
24	Arma Nopianti, ST	Analisis Penataan Kawasan
25	M. Amin, A.Md.Kes	Pengelola Lingkungan Hidup
26	Sepria Jaya	Pengemudi
27	Feri Weldi, A.Md	Pengelola BMD
28	Nurfiarni	Pengadmistrasian Keuangan
29	Mislan	Pengemudi
30	Sugito	Pengadmistrasian Keuangan

Sumber : Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup 2024.

3.1 Sumber Daya Manusia

Mengalokasikan sumber daya manusia merupakan orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, memasarkan produk, sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Sumber daya inilah yang membuat sumber daya lainnya berjalan.

Manusia adalah komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena sebagai pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan yang sangat menentukan dalam perhitungan efektif penyelesaian suatu pekerjaan.

Pemanfaatan sumber daya alam pada dasarnya merupakan proses menuju keadaan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia yang ingin dicapai melalui sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya didasarkan pada prinsip fikih al-bi'ah, bahwa al-Qur'an telah menjelaskan kepada manusia untuk berperilaku baik terhadap bumi karena bumi adalah tempat berlangsungnya kehidupan seluruh makhluk hidup dan membawa kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia.

3.3.1 Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi regulasi tersebut. Salah satu langkah utama dalam strategi ini adalah peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Program pelatihan dapat diadakan

untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik-praktik ramah lingkungan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dapat memperkuat upaya ini melalui penelitian dan pengembangan inovasi yang relevan dengan kondisi lokal.

Dinas terkait dan pemerintahan juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilalihan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian Hutan Mangrove di Nagari Maligi. Dengan mengembangkan SDM yang kompeten dan berdaya saing, diharapkan masyarakat setempat dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga kelestarian kawasan dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pelestarian akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Dengan adanya sosialisasi dan musyawarah dapat diadakan untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat, dengan cara ini diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian Hutan Mangrove di Nagari Maligi. Keterlibatan ini juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat menciptakan kepercayaan dan mendorong kolaborasi yang lebih baik